

# Demokrasi Substansial Dan Aktor Lokal Dalam Perspektif Budaya Politik

Oleh: Dr. I Nyoman Subanda, Msi (Dosen Fisipol Undiknas Denpasar)

## Abstract

Upaya mencari model demokrasi merupakan sebuah proses yang berlangsung terus menerus melalui pergulatan dan dialektika. Bagi Indonesia yang memiliki sejumlah realitas geo-politik, politik ruangan waktu, akan memunculkan fenomena transpolitika. Transpolitika merupakan entitas politik yang bersentuhan dengan entitas yang lain sehingga terjadi kontamidasi. Indonesia setelah 65 tahun merdeka tidak memperlihatkan sejalanannya demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Indikator-indikator seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, melonjaknya angka kekerasan, mengakarnya korupsi, miskinnya opini publik dan lemahnya penegakan hukum merupakan contoh kongkrit tidak berjalannya demokrasi substansial di Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, pendekatan yang paling dilakukan adalah pendekatan budaya. Khususnya budaya politik melalui pendekatan budaya maka aspek penting yang tidak dapat diabaikan adalah peran aktor karena aktor merupakan agensi budaya dan sekaligus sebagai penerus nilai-nilai budaya politik yang ada. Dalam kasus Indonesia selama dekade transisi politik telah menempatkan para aktor yang merupakan faktor dominant dalam menentukan arah demokrasi yang sesungguhnya (demokrasi substansial).

## A. Pendahuluan

Arus utama menuju demokrasi yang dimulai pada dekade 1980-an pada dasarnya dibangun atas dasar keruntuhan rezim-rezim otoritarian-korporatis yang tumbuh dikawasan Eropa dan Amerika Latin. Walaupun banyak karya tulis yang mengupas dan menjadi rujukan studi demokratisasi namun karya tulis tersebut tidak punya kekuatan komparatif untuk menjelaskan gelombang transisi demokrasi yang problematik dari rezim-rezim neopatrimonial diberbagai negara termasuk Indonesia. Untuk kasus Indonesia transisi menuju demokrasi sangat sulit terlaksana karena pada zaman orde baru rezim orde neopatrimonial yang dibangun Presiden Soeharto sangat kokoh. Kokohnya rezim neopatrimonial Orde baru didukung oleh sumber daya material yang dikombinasikan dengan strategi koersi, persuasi, birokratisasi militerisasi, korporatisasi maupun *stick and carro* (Eko, 2003: 331).

Setelah tumbanganya Orde Baru tahun 1998, sistem politik Indonesia mengalami perkembangan relatif dinamis dengan didukung bekerjanya proses desentralisasi dan demokratisasi. Sebagai konsekuensi dari penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka terjadi transformasi pendulum politik dari politik sentralistik ke politik yang bernuansa lokal. Dengan demikian, desentralisasi memberi warna lain dalam proses demokratisasi di Indonesia. Perkembangan Indonesia di era transisi ibarat metafora kotak pandora yang terbuka. Terbukanya kotak pandora membuat berbagai keragaman yang selama ini terpendam saat





ini mendapat angin segar. Dengan kondisi seperti ini pluralisme kepentingan dari berbagai karakter seperti ideologis, kultural serta ekonomi politik teraktualisasi dalam ranah publik. Aktor dan institusi yang sempit "tiarap" akhirnya bermunculan dan memegang peran penting dalam politik nasional maupun lokal (Zuhro, 2009: 120). Di sini permasalahan mulai muncul, ternyata para aktor belum mampu berperan maksimal dalam mendorong masyarakat untuk mewujudkan demokrasi substansial yang berkualitas. Berbagai masalah krusial seperti kesejahteraan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan termasuk kualitas pelayanan publik belum mendapat prioritas para aktor.

Kajian tentang peran aktor dalam proses demokrasi di Indonesia menjadi hal menarik untuk ditaklukan mengingat aktor juga merupakan *agency* budaya. Sebagai *agency* budaya aktor merupakan penerus nilai-nilai budaya politik. Dalam kaitannya dengan *agency* ini aktor tidak dilihat secara pasif melainkan bisa dibaca secara

dinamis dalam sebuah kontinum melalui perannya dalam proses obyektivikasi dan subyektivikasi. Di sisi lain aktor juga merupakan produsen budaya sehingga perilaku politik mempengaruhi perubahan dan kontinuitas nilai-nilai politik.. Dengan demikian peran aktor mempunyai arti penting dalam mewujudkan demokrasi karena tingkah laku dan kebijakan yang dihasilkan akan berpengaruh signifikan terhadap konsolidasi demokrasi (Zuhro, 2009:2).

## B. Urgensi Pendekatan Budaya dan Rasionalitas Demokrasi

Pemahaman tentang budaya politik tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang konsep kebudayaan secara umum. Di antara berbagai definisi kebudayaan, secara singkat kebudayaan dapat dipahami sebagai apa yang diciptakan dan dilakukan manusia serta apa yang ada berkat kemampuan akal, rasa dan daya kreatifnya (aspek seni kebudayaan). Dalam konsep kebudayaan juga terkandung norma yang ada pada manusia, dan apa yang dicita-citakan, yang masih harus diwujudkan (aspek *sollen* kebudayaan) (Kleden,2001:99).

Dengan demikian, budaya politik dapat dipahami sebagai seperangkat norma yang menuntun dan menjadi acuan sikap, keyakinan dan nilai-nilai politik suatu bangsa. Sebagai suatu norma, budaya politik tidak sekadar memberi bentuk dan arti pada suatu tindakan politik, tetapi juga memberi arah yang seyogyanya dapat ditempuh dalam suatu proses politik. Sekurang-kurangnya terdapat tiga fungsi dari budaya politik: yaitu menjadi kerangka pikir atau persepsi dalam melakukan evaluasi terhadap sistem politik, sebagai pedoman bagi tindakan-tindakan politik, dan sebagai alat memberi legitimasi politik (Usman,2004:73). Pemahaman di atas menekankan budaya politik sebagai "*sollen*"; dilihat sebagai pemberi arah, nilai, dan kerangka berpikir bagi tindakan-tindakan politik.

Di sisi lain, terdapat pemahaman bahwa budaya politik bukan hanya sebagai *sollen* (pemberi nilai, arah dan tindakan politik yang harus diikuti), melainkan juga sebagai *sein*; yaitu sebagai proses tindakan manusia apa adanya, yang terus menerus berulang dalam kehidupan politik. Kebudayaan (khususnya budaya politik), tidak cukup dipandang sebagai norma, melainkan juga sebagai se bentuk wacana, yaitu hasil dari pembentukan sosial dari sekelompok orang yang sedang mencari orientasi dalam hidupnya (Kleden,2001:20).

Berdasarkan dua aspek pemahaman tentang budaya politik di atas, tampak bahwa budaya politik sesungguhnya dapat dipahami sebagai kerangka acuan atau norma berpikir dan bertindak dalam kehidupan politik, sekaligus merupakan proses aktivitas kehidupan politik yang sedang berlangsung. Sebagai kerangka acuan atau norma politik, budaya sopan santun dan penghormatan terhadap mereka yang mempunyai kekuasaan misalnya, dianggap sebagai budaya politik yang khas Indonesia. Di sinilah yang dimaksud dengan aspek "*sollen*", sesuatu yang dianggap ideal dan harus diwujudkan. Namun, pelaksanaan kehidupan berpolitik setiap hari juga dapat dikatakan sebagai budaya politik, bila proses pengulangannya terjadi secara tetap. Bila toleransi dalam kehidupan berpolitik berubah



menjadi anarki dan terjadi secara terus menerus, maka anarki dapat dikatakan sebagai bagian dari budaya politik baru, yang dipraktikkan secara konsekuen, sekalipun tidak dibenarkan secara rasional.

Pertanyaan selanjutnya apa kaitan antara budaya politik dengan proses demokrasi? Dua ahli politik Almond dan Verba mencoba mengkaitkan kedua konsep tersebut. Dalam pandangan kedua ahli tersebut tinggi rendahnya suatu budaya politik berkaitan dengan kompetensi masyarakatnya untuk terlibat dalam suatu proses politik. Semakin berkompoten orang-orang dalam masyarakat tertentu untuk berpartisipasi dalam masalah politik, maka semakin tinggi budaya politik masyarakat tersebut, dan dengan demikian semakin stabil pelaksanaan demokrasi pada masyarakat bersangkutan. Demikian pula sebaliknya. Dari hasil penelitian dan survei mereka di berbagai negara di Eropa, Amerika dan Amerika Latin, kedua ilmuwan ini menemukan bahwa negara-negara yang mempunyai budaya politik yang tinggi, akan menopang demokrasi yang stabil. Sebaliknya, negara-negara yang mempunyai budaya politik rendah, tidak mendukung terlaksananya demokrasi yang stabil (Gafar, 2004:101-102).

Karena demokrasi berkaitan erat dengan kualitas sebuah budaya politik, maka muncul kepercayaan yang kuat bahwa demokrasi adalah sistem terbaik dari semua sistem lainnya yang pernah ada. "*Indeed, it has been said that democracy is the worst form of the government except all those other forms that has been tried from time to time*", demikian kata-kata terkenal Winston Churchill. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan terburuk, kecuali apabila dibandingkan dengan semua bentuk pemerintahan yang pernah dicoba dalam sejarah. Rumusan negatif ini secara implisit menegaskan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang tanpa kelemahan. Tetapi, ia tetaplah sistem terbaik dari segenap sistem yang pernah ditampilkan dan dicoba dalam sejarah peradaban. Landasan moral demokrasi adalah bahwa setiap individu berhak menentukan segala hal yang dapat mempengaruhi hidupnya, baik dalam kehidupan bersama maupun personal. Demokrasi juga merupakan cara yang efektif untuk mengontrol penguasa untuk tidak menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan.

Berasumsi dari statemen di atas dapat dikatakan kualitas suatu budaya politik sangat bergantung pada kompetensi para warga negara untuk terlibat dan aktif dalam suatu proses politik. Semakin aktif suatu masyarakat terlibat dalam kehidupan berpolitik, semakin tinggi budaya politik masyarakat bersangkutan. Keterlibatan tersebut bukanlah keterlibatan dalam ketidaktahuan, melainkan berdasarkan

kesadaran dan kompetensi yang memadai untuk mempengaruhi kebijakan publik secara rasional dan bertanggung jawab.

Selain itu, demokrasi menentukan tingginya kualitas suatu budaya politik berdasarkan alasan bahwa demokrasi merupakan sistem yang berusaha mewujudkan kepentingan bersama (*public interest*). Kepentingan bersama adalah moralitas terpenting dari sebuah organisasi sosial. Mutu dan legitimasi suatu organisasi sosial ditentukan sejauh mana kontribusinya dalam mewujudkan kepentingan bersama. Pada akhirnya, kualitas budaya politik bergantung pada kandungan demokrasi di dalamnya.

Bila kualitas suatu budaya politik berkaitan erat dengan kandungan demokrasi di dalamnya, maka apakah sebenarnya demokrasi? Pada taraf elementer, demokrasi pada hakikatnya dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem pemerintahan di mana kedaulatan rakyat menjadi prioritas utama. Semboyan klasiknya: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, pengertian dan penghayatan demokrasi sering berbeda di berbagai belahan dunia. Pengertian demokrasi di negara-negara Barat yang menganut kapitalisme berbeda dengan pengertian demokrasi di negara-negara Barat lainnya yang lebih sosialis. Begitu pula halnya dengan pengertian demokrasi di negara-negara berkembang yang bukan kapitalis atau sosialis. Negara-negara tersebut terkadang mengklaim diri sangat demokratis, bahkan dalam negara-negara otoriter sekalipun.

Demokrasi sesungguhnya merupakan konsep yang luas, yang tidak dapat didefinisikan secara gampang dan serentak. Demokrasi bukanlah paham yang mapan, karena ia terus menerus mengoreksi dirinya agar menjadi semakin sempurna. Konsep di atas bukanlah pengertian yang netral dan permanen, melainkan sebetulnya sikap hidup setiap saat. Karenanya, upaya demokrasi bukanlah upaya yang sekali jadi sesudah itu selesai. Demokrasi menuntut perjalanan yang amat panjang dan tidak pernah berhenti, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Walaupun konsep tentang demokrasi dapat berubah dan terus berkembang, namun terdapat rasionalitas universal dari demokrasi, yang dapat diterima di mana-mana. Untuk itu terdapat dua aspek yang dapat dibedakan yaitu rasionalitas demokrasi dalam pengertian struktural dan rasionalitas demokratis dalam aspek kualitatif atau nilai.

Secara struktural, demokrasi berasal dari konsep elementer di atas yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan demikian, rakyatlah yang menjadi pemerintah atas dirinya sendiri, berdasarkan perwakilan-perwakilannya. Secara struktural, di mana-mana perwakilan rakyatlah yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam tata politik dan pemerintahan. Namun, ciri struktural demokrasi ini hanya merupakan aspek kecil dalam rasionalitas demokrasi. Secara lebih representatif, sifat demokratis suatu bangsa dilihat berdasarkan aspek kualitatif; aspek nilai dan sikap hidup

yang terkandung di dalam suatu penyelenggaraan politik.

Ada pun rasionalitas demokratis dari aspek kualitatif adalah: pertama, aspek kebebasan dalam persamaan *freiheit in einheit* (Shindunata, 2000:9). Dalam demokrasi, kebebasan tidak dipahami sebagai bebas melakukan apa saja, melainkan bebas melakukan apa yang patut dilakukan. Konsep kebebasan seperti ini selalu mengandaikan tanggung jawab. Kebebasan tanpa sebuah tanggung jawab adalah sebetulnya tindakan anarki. Kebebasan bukanlah nilai yang berada pada dirinya sendiri, melainkan sarana untuk mencapai cita-cita demokrasi yang ingin dikejar, seperti kesejahteraan, perubahan masyarakat dan kemanusiaan. Rasionalitas demokrasi yang sejati selalu mengandaikan adanya kebebasan, sebagai sarana untuk mencapai apa yang ingin dicapai. Kebebasan itu dipergunakan dalam persamaan hak dan kesempatan, dalam satu kesatuan. Tanpa persamaan hak dan kesempatan dalam kehidupan bermasyarakat, maka kebebasan suatu pihak akan menjadi terlalu dominan, yang pada gilirannya menindas pihak lain. Jadi, demokrasi selalu mengandaikan kebebasan dalam suasana yang adil.

Kedua, aspek hak asasi manusia dalam rasionalitas demokrasi. Pada masa ini, demokrasi sejati selalu mengandaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pandangan ini merupakan jalan keluar dari persoalan relativitas demokrasi itu sendiri, terlebih dalam konsep demokrasi yang menekankan dimensi kultural dan dimensi sosial. Dalam dimensi kultural, demokrasi diklaim sebagai khas kebudayaan tertentu, sehingga terdapat demokrasi ala Asia,

atau demokrasi ala Barat. Namun, demokrasi kultural ini dapat diselewengkan menjadi eksklusivisme, yang menuntun orang untuk tidak toleran dan bersikap fundamentalis. Demikian pula demokrasi yang menekankan dimensi sosial dapat diselewengkan menjadi diktator proletariat. Karena itu, tercetus prinsip yang bersifat universal, yang independen dari kewarganegaraan manapun atau dari institusi politik manapun, yang menjaga hak individu dan kemanusiaannya, yaitu konsep hak asasi manusia. Dengan demikian, rasionalitas demokrasi selalu mengandaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tanpanya, demokrasi yang terjadi hanya merupakan pembenaran terhadap ideologi atau kepentingan tertentu, dengan menindas manusia-manusia nyata.

## C. Menguji Rasionalitas Demokrasi Substansial

Berdasarkan dua prinsip rasionalitas demokrasi di atas, maka dengan sendirinya dapat diuji berbagai bentuk demokrasi di berbagai belahan dunia. Setiap negara berhak mengklaim dirinya sebagai penganut demokrasi. Namun, apakah kualitas demokrasi yang dianutnya sungguh-sungguh autentik berdasarkan rasionalitas demokrasi di atas? Dalam konteks ini kita dapat menguji, apakah negara-negara liberal yang mengklaim dirinya demokratis, memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia? Sering dalam pagangungan kebebasan yang hampir mutlak dan suasana persaingan kapitalisme global, aspek hak asasi individu yang lebih lemah selalu bisa dikorbakan.

Demikian pula, apakah Indonesia yang mengklaim dirinya mempunyai sistem demokrasi yang khas yaitu demokrasi Pancasila, sudah memperhatikan kebebasan dalam persamaan dan Hak Asasi Manusia? Gotong royong yang menjadi salah satu aspek demokrasi Pancasila misalnya, pada praktiknya dapat diselewengkan menjadi bentuk pengingkaran tanggung jawab pribadi, sekaligus pemaksaan terhadap kebebasan orang lain untuk mengembangkan aspek kepentingan individualnya. Dengan pelanggaran terhadap hak asasi dan kebebasan individu, maka sebenarnya bentuk demokrasi yang diklaim bukanlah demokrasi yang autentik, melainkan sebetulnya sebetulnya ideologi, dengan memanfaatkan kepercayaan publik terhadap kebaikan demokrasi

Demokrasi menurut Darwin (1999: xvii) mempunyai dua musuh utama yakni tirani dan anarkis. Ketika kekuasaan orde baru masih kuat, dunia menggolongkan negara kita sebagai negara tirani bahkan merupakan satu dari dua negara (selain Cina) yang masih dicap sebagai negara tirani di dunia. Namun ketika Orde baru tumbang dan era Reformasi kita songong maka kita dinobatkan sebagai negara yang demokratis bahkan dianggap negara demokratis nomer dua di dunia. Secara prosedural Indonesia



memang demokratis karena hak-hak rakyat telah diperjuangkan dan terealisasi dalam berbagai helatan politik seperti pilkada langsung, legislatif langsung bahkan pilpres langsung. Dibalik demokrasi prosudural tersebut secara tidak terasa ternyata Indonesia telah menganut musuh demokrasi yang kedua yakni anarkis. Berbagai kekerasan dalam masyarakat baik yang dilakukan elit, aktor, pemerintah maupun masyarakat nampaknya menjadi sesuatu yang lumrah dan latah terjadi di era reformasi ini. Berbagai kasus kekerasan termasuk juga kekerasan bahasa sering terefleksi dalam proses

pencapaian demokrasi substansial yang terjadi di Indonesia. Ini artinya bahwa Indonesia di era reformasi dan telah dinobatkan menjadi negara yang demokratis nomor dua di dunia belum lulus melewati ujian berdasarkan kriteria demokrasi substansial bahkan masih bergulat pada arena musuh demokrasi yang kedua.

## D.Peran Aktor Dalam Mewujudkan Demokrasi Substansial

Setelah orde baru tumbang dan era reformasi digulirkan maka aktor-aktor yang terlibat dalam proses politik semakin plural dan semarak. Ketika orde baru aktor politik yang dominan hanya birokrasi dan militer maka ketika era reformasi aktor-aktor yang terlibat sangat beragam dan tersegmentasi menurut garis profesi, kelompok kepentingan, lembaga tadisional, kelas dan lain sebagainya. Reformasi kelembagaan demokrasi di era reformasi saat ini juga terlihat terdorongnya aktor-aktor politik yang semakin banyak dan beragam dan memiliki tingkat densitas yang tinggi. Dalam konteks kehadiran aktor yang semakin beragam ini muncul beberapa pertanyaan yang menyangkut peran aktor dalam mendorong dan menghambat proses demokratisasi. Pertanyaan penting yang mungkin dapat di ajukan adalah apakah liberalisasi politik dan kebebasan aktor untuk terlibat dalam proses politik dapat menjamin kualitas dan stabilitas demokrasi. Selain itu pertanyaan penting yang juga dapat diajukan adalah; apakah kesemaran aktor-aktor politik dapat memberikan peluang bangkitnya nilai-nilai budaya politik demokratis dalam masyarakat. Untuk menjawab berbagai pertanyaan di atas dalam tulisan ini akan memberikan tanggapan berdasarkan hasil penelitian beberapa peneliti tentang demokrasi lokal di beberapa daerah di Indonesia.

Hasil penelitian Vedi R Hadiz (2004), menyimpulkan bahwa pada ranah lokal telah terjadi kecenderungan reorganisasi kekuasaan dari kelompok oligarki. Dalam perspektif demokrasi oligarki terjadi kolaborasi kekuasaan politik di daerah antara aktor politik lama yang berkolaborasi dengan para kapitalisasi lokal. Hasil kolaborasi aktor-aktor tersebut akhirnya mereka dapat menguasai sumber daya ekonomi dan politik lokal. Hasil penguasaan sumber daya ekonomi dan politik lokal ini berimplikasi secara langsung terhadap keberhasilan mereka memanipulasi arah desentralisasi dan demokrasi yang terjadi. Alhasil aktor-aktor lokal akhirnya berhasil menempatkan orang-orang dekat mereka pada posisi-posisi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menguasai berbagai sumber daya yang ada.

Hasil penelitian lain disampaikan oleh penelitian Fisipol UGM (2000). Hasil penelitian ini secara jelas menyatakan bahwa di era reformasi muncul lagi entitas politik masa lalu dan semakin dominannya peranan *local boss*, dalam interaksi politik lokal. Munculnya kembali para aristokrat di tingkat lokal banyak terjadi di daerah-daerah seperti Surakarta, Denpasar, Bantul, Gianyar, dan beberapa daerah lain yang ditunjukkan dari hasil penelitian Fisipol UGM ini. Beberapa penelitian di atas memperlihatkan peranan elit lokal sebagai *pradatory broker* politik yang memiliki kontrol monopolistik terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi di daerah mereka.

Hasil-hasil penelitian di atas identik juga dengan perspektif yang disampaikan beberpa penulis seperti Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken yang menyampaikan pandangan bahwa melemahnya negara pusat



tidak secara otomatis menimbulkan menguatnya demokrasi lokal. Adakalanya di saat-saat tertentu demokratisasi berbarengan dengan bentuk-bentuk pemerintahan otoriter. Kasus-kasus pemekaran daerah ditunjukkan oleh analisis kedua ilmuwan di atas sebagai contoh kongkrit dari proses desentralisasi dan dinamika elit di tingkat lokal.

Beberapa kajian dan studi di atas juga menemukan bahwa telah terjadi pergeseran peran dalam proses demokrasi yakni dari fokus peran struktur bergeser pada fokus peran elit atau aktor. Dengan demikian maka beberapa studi tentang demokrasi memusatkan

perhatian pada peran aktor untuk memetakan dan menjelaskan proses demokratisasi. Studi mengenai aktor dianggap begitu penting karena melalui studi ini kita dapat melihat pertarungan antar aktor dalam menentukan apakah demokrasi mulai dari atas atau dari bawah.

## E. Penutup

Penguatan kelembagaan demokrasi sangat ditopang oleh budaya dalam masyarakat. Budaya sangat membantu perkembangan bangsa dalam seluruh segmen kehidupan. Habermas (Hardiman, 2008: 131) menunjukkan demokratisasi tidak dapat ditanamkan dari luar ke dalam masyarakat-masyarakat kompleks. Demokratisasi berkembang dari dalam masyarakat sendiri dan didorong oleh sistem politik yang sudah ada. Eksistensi dan kontinuitas masyarakat yang diformat dan didesign budaya ikut menentukan sistem politiknya. Politik dapat mengubah sebuah budaya dan budaya juga akan menopang substansi demokrasi. Budaya adalah subyektivitas nilai-nilai, kepercayaan, sikap, orientasi dan praduga mendasar yang lazim diantara orang-orang dalam masyarakat. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr (Fatuhrohman dan Sobari, 2002:232) menyatakan budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, dan juga terdapat kecenderungan dan pola-pola khusus pada bagian populasi tersebut.

Konseptual budaya politik mengarah dan memandu warga secara massif dan massal agar dapat menciptakan sistem politik yang ideal (demokrasi substansial). Politik juga berpeluang mempengaruhi budaya. Misalnya Singapura, Malaysia walaupun membatasi demokrasi tetapi berhasil mengambil sikap penegakan hukum yang keras agar tidak tumbuh budaya korupsi. Sebaliknya, budaya juga mampu mempengaruhi penguatan kelembagaan hukum dan arah demokrasi substansial. Demokrasi substansial merupakan demokrasi yang ditopang oleh sikap dan perilaku budaya masyarakat yang konstruktif, jauh dari perilaku anti budaya.

Di Indonesia proses kearah pembudayaan politik dan transformasi kultural sedang terjadi. Yang menjadi soal adalah akselerasi politik, dalam arti bahwa tata aturan politik (*politik law*) sebagai buah reformasi, ternyata belum disertai akselerasi budaya. Akselerasi politik, masih diwarnai oleh sikap-sikap dan perilaku anti budaya. Akselerasi juga belum sepenuhnya diikuti oleh suatu jaminan "kepastian politik", karena sistem yang berbentuk masih cenderung tumpang tindih, rancu, dan bahkan bertabrakan.

Secara rasional demokrasi dapat berjalan secara efektif, syaratnya kalau para aktor dan masyarakat politiknya tidak bersifat anti budaya, sehingga demokrasi substansial benar-benar terwujud dan pintu masuk menuju nilai politik yang berpihak pada kesejahteraan bersama, penegakkan HAM, keadilan, pemerhatian ekologis, tingkat partisipasi penguatan masyarakat madani, serta pengakuan hak minoritas.

Tranformasi kultural menuju demokrasi substansial hanya terjadi dan dimulai dari keluarga sebagai miniatur negara, lembaga pendidikan sebagai laboratorium demokrasi, masyarakat sebagai entitas peradaban demokrasi melalui habitus politik berbudaya, pers sebagai suara profetik demokrasi, dan lembaga kekuasaan dan aktornya sebagai perilaku hidup dari budaya politik.

